

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN TAMAN MALIOGORO SEBAGAI IKON WISATA KABUPATEN BOJONEGORO

M Wafiq Hidayat^{1*}, Ahmad Taufiq², Rupiarsieh³.

^{1,2,3}. Program Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bojonegoro, Indonesia

*Korespondensi: wafiqhidayat91@gmail.com

Citation (APA):

Hidayat, M. W., Taufiq, A., & Rupiarsieh, R. (2024). Collaborative Governance dalam Mewujudkan Taman Maliogoro Sebagai Ikon Wisata Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2), 541–550. <https://doi.org/10.33506/jn.v10i2.3896>

Email Autors:

wafiqhidayat91@gmail.com
taufiq.alfazka@gmail.com
arsieh_sakti@yahoo.com

Submitted: 15 November, 2024

Accepted: 06 Desember, 2024

Published: 16 Desember, 2024

Copyright (c) 2024 M Wafiq Hidayat,
Ahmad Taufiq, Rupiarsieh

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan berupa sumber daya minyak dan gas, serta sejumlah destinasi wisata yang berpotensi untuk dikembangkan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan *Collaborative Governance* dalam mewujudkan Taman Maliogoro sebagai Ikon wisata Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, mencakup kegiatan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumentasi di lokasi penelitian. Berdasarkan penelitian menggunakan lima indikator utama, ditemukan bahwa keberhasilan kolaborasi antar pemangku kepentingan dipengaruhi oleh *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *share understanding*, *intermediate outcome* menjadi kunci utama. Kini, Taman Malioboro telah menjadi destinasi favorit yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang harmonis antara Pemerintah, Komunitas, dan sektor swasta memiliki peran krusial dalam mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Kata kunci: Taman Maliogoro; Collaborative Governance; Ikon Wisata

ABSTRACT

Bojonegoro Regency has wealth in the form of oil and gas resources, as well as a number of tourist destinations that have the potential to be developed in supporting the improvement of community welfare. This research aims to understand the application of *Collaborative Governance* in realising Maliogoro Park as a tourist icon of Bojonegoro Regency. This research uses a qualitative approach with descriptive methods, including observation, interviews, and documentation collection at the research location. Based on research using five main indicators, it was found that the success of collaboration between stakeholders was influenced by *face-to-face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding*, *intermediate outcome* became the main key. Today, Malioboro Park has become a favourite destination that has a positive impact on local economic growth. This shows that harmonious collaboration between the Government, Community, and private sector has a crucial role in encouraging sustainable tourism development.

Keywords: Maliogoro Park; Collaborative Governance; Tourism Icon

PENDAHULUAN

Kabupaten Bojonegoro Merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki letak yang strategis. Wilayah ini juga terkenal sebagai daerah penghasil minyak dan gas alam, tetapi juga menawarkan beragam destinasi wisata alam dan buatan yang layak untuk dijelajahi sehingga dapat mendorong pengembangan pariwisata untuk memperkenalkan Bojonegoro kepada masyarakat luar daerah (Nanda et al., 2024). Dalam pembangunan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya berperan dalam meningkatkan taraf hidup mereka sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, baik di level lokal maupun nasional, diperlukan pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata yang optimal. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah, pihak swasta, dan komunitas lokal sangat dibutuhkan dalam mengelola potensi pariwisata (Ikhsan, 2024). Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah membuat regulasi “Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020” Rencana Induk

Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2025 mencakup beberapa aspek penting. Fokus pengembangan meliputi destinasi wisata, promosi dan pemasaran pariwisata, penguatan sektor industri pariwisata, serta pengembangan kelembagaan yang mendukung kemajuan sektor ini.

Pentingnya dalam mewujudkan Taman Maliogoro sebagai ikon wisata Kabupaten Bojonegoro agar dapat meraih target pembangunan yang telah direncanakan dan ditentukan dampak positif dari segi ekonomi adalah peningkatan pendapatan daerah pasca dibangunnya Maliogoro yang lebih baik dibandingkan sebelumnya (Maharani, 2024). Pengembangan mencakup berbagai aspek, seperti atraksi wisata, fasilitas dan infrastruktur pendukung, promosi destinasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Dalam mengelola destinasi wisata, diterapkan beragam strategi untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lokal, termasuk pengembangan objek wisata dan daya tariknya, yang bertujuan menciptakan pengalaman menyenangkan bagi pengunjung, indah, nyaman, dan bersih. Dengan akses yang baik, mewujudkan Taman Maliogoro sebagai ikon wisata di Kabupaten Bojonegoro (Wiraloka & Mukzam, 2017). Taman Maliogoro ini terletak di ruas jalan Mh.Thamrin dengan panjang 1.335 km (Dinas Perhubungan, 2021). Fasilitas yang disediakan antara lain seperti penyediaan tempat pembuangan sampah dan toilet, pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum seperti bangku dan tempat parkir mobil di trotoar untuk mencegah kerusakan yang tidak disengaja, serta penghormatan terhadap pejalan kaki yang menggunakan trotoar dengan baik (Pemkab Bojonegoro, 2023).

Permasalahan awal dalam pembangunan Taman Maliogoro sejumlah warga Bojonegoro mengungkapkan keluhan terkait proses pembangunan. Hal ini disebabkan oleh adanya pendapat dari banyak orang bahwa selama kegiatan konstruksi berlangsung, bahan material seperti batu, pasir, dan baja sering kali ditempatkan di pinggir jalan akan berdampak besar terhadap lalu lintas di sekitar jalan tersebut (Qulub, 2023). Dalam mewujudkan Taman Maliogoro sebagai ikon wisata Kabupaten Bojonegoro tentu membutuhkan peran dan sinergi dari stakeholder. Adanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Collaborative Governance* yang dijalankan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Kelurahan, Komunitas dan Pedagang dalam Mewujudkan Taman Maliogoro Sebagai Ikon Wisata Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, ditemukan beberapa permasalahan sehubungan dengan kolaborasi para pihak dalam pengembangan wisata Maliogoro. Beberapa informan mengaku sejauh ini komitmen untuk membangun sinergi antara kelurahan dengan pedagang belum terbentuk hal ini disebabkan kurangnya komunikasi oleh pihak yang terlibat sehingga dalam proses pengelolaan belum berjalan dengan baik, masih banyak keluhan para pedagang antara lain persaingan sesama pedagang yang masih sering terjadi keributan dalam penggunaan lapak untuk berjualan, serta penurunan omzet akibat daya tarik wisata yang semakin menurun sehingga wisatawan yang berkunjung semakin berkurang. Dengan hal ini peran kerja sama antara kelurahan, pedagang dan masyarakat setempat belum maksimal dalam mewujudkan Taman Maliogoro sebagai ikon wisata Kabupaten Bojonegoro. Dalam penerapan *collaborative governance* dalam mewujudkan Taman Maliogoro sebagai ikon wisata Kabupaten Bojonegoro masih mengalami kendala kurangnya keterikatan para *stakeholders* yang masih belum maksimal, (Wawancara awal 19 Oktober 2024).

Menurut (Ansell & Gash, 2008) dalam penelitiannya *collaborative governance* adalah sebuah mekanisme dalam pengambilan keputusan yang melibatkan kerjasama antara satu atau lebih instansi pemerintah dengan organisasi non-pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk menerapkan kebijakan publik dan mengelola sumber daya publik. Dalam proses kolaborasi ini, terdapat lima elemen kunci yang harus ada, yaitu: (1) Dialog tatap muka; (2) Membangun kepercayaan; (3) komitmen terhadap proses; (4) Pemahaman bersama; dan (5) Hasil antara. Berdasarkan pengertian tersebut, *collaborative governance* dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama antara berbagai pihak untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Dengan pendekatan ini, diharapkan mampu menjadi solusi dalam mewujudkan Taman Malioboro sebagai ikon wisata Kabupaten Bojonegoro, sekaligus menciptakan sinergi antara masyarakat, komunitas, sektor swasta, dan pemerintah dalam menyusun kebijakan pengembangan potensi pariwisata. Usaha pariwisata sendiri merupakan sektor yang menyediakan layanan baik secara eksplisit maupun implisit, pariwisata mempengaruhi para pengunjung. Sementara itu, fasilitas pendukung pariwisata meliputi dari seluruh fasilitas utama atau dasar yang menunjang kelancaran dan pengembangan fasilitas pariwisata dalam melayani wisatawan (Hariyanto et al., 2018).

Pada penelitian terdahulu yang berjudul "*Collaborative Governance* dalam pengembangan destinasi wisata edukasi *Little Texas* di Wonocolo Bojonegoro" diteliti oleh (Parassari et al., 2022) Mengulas mengenai rencana pengembangan destinasi wisata edukasi *Little Texas* yang berlokasi di Wonocolo, Bojonegoro dengan pendekatan *collaborative governance* bertujuan untuk mengembangkan pariwisata di Wonocolo dan mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar, pengembangan wisata edukasi teksas wonocolo telah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dari tingkat yang besar sampai yang kecil. Sebelum adanya wisata edukasi masyarakat hanya mengandalkan produksi minyak tradisional.

Pada penelitian terdahulu yang berjudul "*Collaborative Governance* dalam pengembangan wisata Waduk Bendo Didesa Bendo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro" yang diteliti oleh (Nanda et al., 2024) menjelaskan tentang dalam proses pengembangan terjadi proses kolaboratif dimana para pihak saling mendukung, namun hal tersebut tidak sepenuhnya berhasil. belum tercapai karena belum terdapat peraturan resmi yang mengatur jalannya kerja sama, namun kurangnya kesungguhan dari semua pihak yang terlibat dalam mencapai tujuan bersama, ditambah dengan keterbatasan jumlah tenaga kerja serta anggaran yang sangat terbatas untuk pembangunan.

Pada penelitian terdahulu yang berjudul "*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur" yang diteliti oleh (Mukti et al., 2022) menjelaskan tentang terbentuknya desa wisata menjadi sebuah impian bagi warga Desa Ngargogondo diharapkan untuk tidak ketinggalan dalam perkembangan sektor pariwisata, mengingat beberapa desa tetangga telah lebih dahulu diakui sebagai desa wisata. Struktur jaringan yang tidak terkoordinasi menyebabkan *collaborative governance* kurang optimal menjadi kendala dalam percepatan pembentukan desa wisata Ngargogondo.

Pada peneliti terdahulu yang berjudul "*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Kampung Majapahit Sebagai Desa Wisata di Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto" yang ditulis oleh (Vandayani et al., 2022) membahas mengenai Desa Bejjong, yaitu desa di Kecamatan Trowulan terpilih sebagai kawasan pengembangan II, yang akan dikembangkan menjadi area destinasi wisata

sejarah. Desa di kawasan desa Majapahit mempunyai keunggulan dan nilai yang signifikan karena lokasinya yang berada di jantung bekas ibu kota Kerajaan Majapahit.

Berdasarkan uraian konsep yang disampaikan di atas yang menjadi fokus penelitian ialah bagaimana proses mewujudkan Wisata Taman Maliogoro sebagai ikon Wisata Kabupaten Bojonegoro dalam konsep *collaborative governance* studi ini bertujuan untuk menggali bagaimana kolaborasi pemerintahan diterapkan dalam sebuah proses mewujudkan Taman Maliogoro Sebagai Ikon wisata Kabupaten Bojonegoro.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dipahami sebagai rangkaian proses yang menghasilkan informasi dalam bentuk narasi, baik tertulis maupun lisan, yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumen, arsip, dan tes (Nugrahani, 2008). Tujuan dari penerapan metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait penerapan kolaborasi dalam mewujudkan Taman Maliogoro sebagai ikon wisata Kabupaten Bojonegoro. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *collaborative governance* dari (Ansell & Gash, 2008) yang melibatkan lima indikator utama, yaitu: (1) *Fase to fase dialogue*; (2) *Trust building*; (3) *Commitment to process*, (4) *Share understanding*, dan (5) *Intermediate outcome*. Digunakan untuk melakukan proses penelitian. Dalam tabel berikut menampilkan jumlah informan penelitian:

Tabel I: Jumlah Informan Penelitian.

No.	Kelompok	Stakeholders
1.	Instansi Pemerintah Daerah	- Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata - Kepala Dinas Perhubungan
2.	Pemerintah Kelurahan	Kepala Kelurahan Ledok Wetan.
3.	Komunitas	Ketua Karang Taruna.
4.	Pedagang	Pedagang Dikawasan Taman Maliogoro.
5.	Pengunjung	Pengunjung Taman Maliogoro.

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2024

Teknik penentuan informan dilakukan metode purposive sampling adalah cara pemilihan sumber data yang didasarkan pada pertimbangan khusus, yakni memilih informan yang memiliki pemahaman paling mendalam mengenai informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti (Ismail Suardi Wekke, 2020) Sebelumnya, peneliti melakukan observasi pendahuluan untuk mengetahui gambaran keseluruhan dalam mewujudnya Taman Maliogoro sebagai ikon wisata Kabupaten Bojonegoro. Teknik analisis data bersifat kualitatif menekan pada makna (Creswell, 2013). Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan tiga metode, yaitu observasi, wawancara sumber informasi utama didapatkan melalui percakapan mendalam antara peneliti dan narasumber sebagai metode pengumpulan data utama yang relevan observasi secara langsung di lapangan, sumber data sekunder didapat melalui dokumentasi dilokasi Taman Maliogoro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Collaborative Governance suatu proses dalam mewujudkan Taman Maliogoro sebagai ikon wisata Kabupaten Bojonegoro mengacu pada indikator yang ada dalam proses kolaborasi pada model *collaborative governance* menurut (Ansell & Gash, 2008) Sebagai berikut:

Dialog Tatap Muka (*Face To Face dialogue*). Proses kerja sama pemerintah yang melibatkan berbagai pihak dilakukan dengan cara berinteraksi secara langsung antara para pemangku kepentingan melalui diskusi langsung. Oleh karena itu, pendekatan ini penting dalam menciptakan komunikasi yang intens, yang memungkinkan para pihak untuk mengeksplorasi potensi keuntungan bersama (Orgita et al., 2024) dialog tatap muka ini menjadi sarana yang efektif dalam membangun kepercayaan, terutama dalam menyatukan tujuan program-program yang ada (Dwi Alamsyah et al., 2019) Kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam mewujudkan Taman Malioboro sebagai ikon wisata di Kabupaten Bojonegoro, melalui acara tahunan *Gemerlap Thamrin Bojonegoro*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dheny Ike yang menjabat sebagai seksi bidang kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, beliau menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan dialog tatap muka (*face to face dialogue*) yang diadakan Satu Tahun sekali dalam pelaksanaan kegiatan *Gemerlap Thamrin Bojonegoro* yang melibatkan beberapa aktor pemangku kepentingan, Dalam kegiatan tersebut yaitu salah satunya bentuk dari mewujudkan Taman Maliogoro sebagai ikon wisata dan mempromosikan agar dikenal oleh wistawan dari lokal Bojonegoro maupun dari luar Bojonegoro. Dalam kegiatan dialog tatap muka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro selaku stakeholders utama dalam pelaksanaan kegiatan *Gemerlap Thamrin Bojonegoro*, selalu melibatkan masyarakat sekitar dan para pedagang yang berada wilayah Taman Maliogoro agar mengikuti dan mendukung kegiatan tersebut”(Wawancara 05,November 2024).

Membangun Kepercayaan (*Trust building*). Membangun kepercayaan antara pemangku kepentingan yang terlibat sangat krusial untuk mewujudkan Taman Maliogoro sebagai ikon wisata Kabupaten Bojonegoro dengan cara berkomunikasi yang efisien. Menurut (Ansell & Gash, 2008) ketidakpercayaan antara para pemangku kepentingan sering kali menjadi penghalang utama dalam pengelolaan kolaboratif. Keberhasilan dalam kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh proses negosiasi, tetapi juga oleh upaya untuk memperkuat hubungan saling percaya antara pihak-pihak yang berpartisipasi. Menumbuhkan kepercayaan adalah elemen krusial dalam kolaborasi, meskipun tidak selalu mudah dilakukan secara langsung. Kepercayaan dapat dibangun melalui komunikasi informal yang berkelanjutan, yang melibatkan semua pihak sehingga tercipta keterbukaan dan keberanian dalam berbagi pandangan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan bersama (Parassari et al., 2022) Dalam kegiatan *Gemerlap Thamrin Bojonegoro*, proses membangun kepercayaan menjadi dasar dari kolaborasi yang terjalin. Karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menginisiasi kolaborasi dalam kegiatan tersebut untuk memperkuat kepercayaan di antara stakeholders dan menjaga kelanjutan kerja sama dalam Mewujudkan Taman Malioboro sebagai ikon wisata Kabupaten Bojonegoro. Menurut Ibu Dheny Ike, Seksi Bidang Kebudayaan dari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, hal ini merupakan langkah awal dalam memastikan kolaborasi yang efektif:

“Pihak Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro berkolaborasi dengan sejumlah pihak terkait. Kerja sama ini bertujuan membangun hubungan yang saling mendukung dan efisien para aktor dalam kegiatan *Gemerlap Thamrin Bojonegoro* yang berada di Taman maliogoro. kegiatan tersebut dilakukan salah satunya untuk mempromosikan Taman Maliogoro agar menjadi ikon wisata Kabupaten Bojonegoro” (Wawancara 05,November 2024).

Tabel II: Data Aktor dan Wewenang dalam Mewujudkan Taman Maliogoro Sebagai Ikon Wisata Kabupaten Bojonegoro.

Aktor	Wewenang
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Sebagai Stakeholders utama kegiatan <i>Gemerlap Thamrin Bojonegoro</i> dalam mewujudkan taman maliogoro sebagai ikon wisata Kabupaten Bojonegoro.
Dinas Perhubungan	Sebagai Stakeholders yang bertanggung jawab terhadap ketertiban jalan dan parkir Taman Maliogoro.
Kelurahan Ledok Wetan	- Memberikan fasilitas dalam menampung kritik dan saran masyarakat sekitar. - Menjalin kerja sama dalam mengembangkan taman maliogoro.
Karang Taruna	Ikut serta dalam menjaga ketertiban pedagang Ditaman Maliogoro.
Pedagang	Berperan sebagai pedagang yang berada dikawasan taman maliogoro agar para wisatawan tertarik untuk berkunjung.
Pengunjung	Wisatawan yang berkunjung dan menikmati suasana Taman Maliogoro.

Sumber: data diolah dari hasil peneliti, 2024

Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to process*). Selama pelaksanaan kolaborasi, semua pihak yang terlibat akan menunjukkan dedikasi terhadap jalannya proses, yang tercermin dari tindakan yang mereka lakukan dalam kegiatan tersebut. Komitmen dapat dilakukan melalui upaya pelaksanaan tugas dan memprioritaskan tujuan bersama agar mencapai tujuan dalam proses kolaborasi memerlukan kesepakatan untuk tetap berpegang pada hasil konsultasi awal, meskipun hasilnya tidak sepenuhnya didukung oleh para pemangku kepentingan. Tata kelola yang bersifat konsensus dan kolaborasi akan mengurangi resiko oleh pemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008). Komitmen merupakan fondasi penting dalam kolaborasi. Komitmen dapat dikatakan menjadi pilar dan landasan bagi masing-masing pihak dalam bekerja sama. Dalam komitmen juga menjaga kepercayaan agar tidak melanggar kesepakatan bersama dalam kolaborasi (Permatasari Arini, 2023). Dalam pelaksanaan *Gemerlap Thamrin Bojonegoro* yaitu salah satu kegiatan yang ikut serta dalam mewujudkan Taman Maliogoro sebagai ikon wisata dan agar dapat dikenal luas oleh wisatawan. Para aktor yang berperan dalam kegiatan tersebut memiliki tujuan bersama dalam mewujudkan Taman Maliogoro sebagai ikon wisata Kabupaten Bojonegoro. Hasil wawancara Informan Ibu Dheny Ike selaku Seksi Bidang Kebudayaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro menyatakan bahwa:

“Dalam Mewujudkan Taman Maliogoro sebagai ikon wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan acara tahunan *Gemerlap Thamrin Bojonegoro* yang melibatkan berbagai pihak yang berkolaborasi. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan acara tersebut, belum ada sistem atau kesepakatan kerja sama yang ditetapkan secara formal atau tertulis antara para pihak yang terlibat. Namun, segala aktivitas yang terkait dengan penerapan *Collaborative Governance* Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro selalu mengikutsertakan semua pihak yang relevan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menunjukkan komitmen terhadap proses dengan melibatkan aktor-aktor terkait dalam setiap tahapan selalu

menjaga komunikasi untuk membangun kepercayaan dalam kolaborasi bersama” (Wawancara 05, November 2024).

Gambar I: Kegiatan *Gemerlap Thamrin Bojonegoro*



Sumber: Dokumentasi kegiatan, 2024

Pemahaman Bersama (*Share understanding*). Dengan adanya pemahaman bersama (*share understanding*) para pihak yang terlibat dalam kerja sama telah menyadari kemampuan masing-masing individu (Rahmawati et al., 2023) Seiring berjalannya waktu dalam proses kerja sama, mereka mulai membangun kesepahaman bersama mengenai cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pengembangan kesepahaman ini bisa dianggap sebagai bagian dari suatu proses kolaboratif dalam belajar yang lebih komprehensif (Ansell & Gash, 2008). Dalam menyelenggarakan suatu kegiatan pemahaman bersama sangat penting agar kolaborasi berjalan dengan lancar. Komunikasi sangat berpengaruh dalam menjalankan kegiatan dengan memahami bersama, Saling memahami dan menghormati keberagaman adalah kunci untuk mencapai tujuan yang sama dalam sebuah kolaborasi. Menurut Ibu Dheny Ike, yang menjabat sebagai seksi Dalam Bidang Kebudayaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro mengungkapkan bahwa:

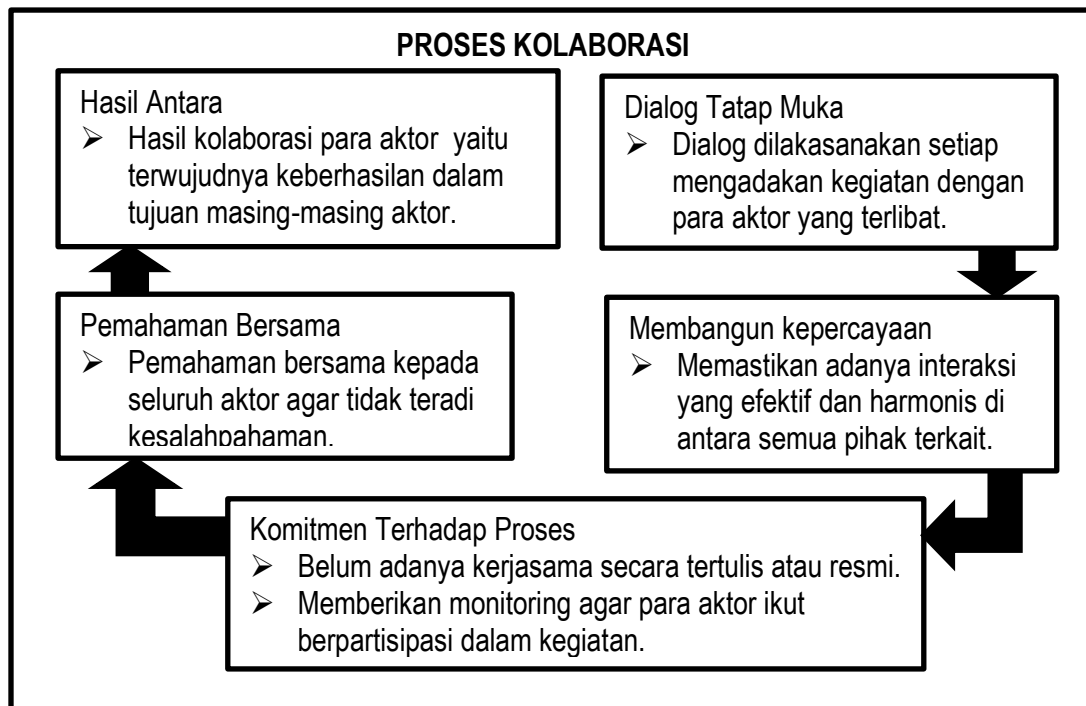
“Dalam pelaksanaan pemahaman bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memfasilitasi forum pertemuan para pemangku kepentingan untuk memberikan saran dan masukan untuk menyamakan persepsi bersama. Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan menampung semua saran dan masukan agar memberikan solusi bagi para aktor yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kegiatan *Gemerlap Thamrin Bojonegoro* memiliki tujuan utama dalam mewujudkan taman maliogoro sebagai ikon wisata kabupaten bojonegoro agar dikenal luas oleh wisatawan berbagai daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjelaskan bahwa adanya kegiatan tersebut proses kolaborasi dengan para aktor dapat dikatakan berhasil dalam pelaksanaan pemahaman bersama,” (Wawancara 05, November 2024).

Hasil Antara (*Intermediate outcome*). Meskipun hasil antara mungkin merupakan hasil yang nyata, namun hal ini disajikan mengungkapkan bahwa proses yang signifikan diperlukan untuk menciptakan dorongan yang akan mendukung tercapainya kerja sama yang berhasil (Ansell & Gash, 2008). Hasil antara harus bisa dikenali dan diukur agar dapat dijadikan referensi jangka panjang. Untuk memprediksi hasil yang tertunda dan sulit diukur setiap hasil harus dapat diidentifikasi agar lebih mudah dalam proses pengukuran (Permatasari Arini, 2023). Untuk mengukur hasil antara (*Intermediate outcome*) dalam mewujudkan Taman Maliogoro sebagai ikon wisata Kabupaten Bojonegoro, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan kegiatan *Gemerlap Thamrin Bojonegoro* melalui kolaborasi dengan para aktor yang ikut serta dalam

kegiatan. Dari informan Ibu Dheny Ike selaku seksi bidang Kebudayaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro mengungkapkan:

“Hasil antara dalam mewujudkan Taman Maliogoro sebagai ikon wisata Kabupaten Bojonegoro menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah berjalan dengan baik dan dapat dikatakan berhasil. Dilaksanakannya kegiatan *Gemerlap Thamrin Bojonegoro* yang berkolaborasi dengan para aktor, kegiatan tersebut selain dapat mewujudkan Taman Maliogoro sebagai ikon wisata tetapi banyak menguntungkan beberapa pihak termasuk pedagang yang membuka lapak dikawasan Taman Maliogoro semakin banyak pembeli. Harapannya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat melaksanakan kegiatan *Gemerlap Thamrin Bojonegoro* setiap tahun sekali dengan berkolaborasi oleh para aktor,” (Wawancara 05, November 2024).

Gambar:II Proses *Collaborative Governance* dalam Mewujudkan Taman Maliogoro Sebagai Ikon Wisata Kabupaten Bojonegoro.



Sumber: data diolah dari hasil peneliti, 2024

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan mengenai *Collaborative Governance* dalam mewujudkan Taman Maliogoro sebagai ikon wisata di Kabupaten Bojonegoro, dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi antara para aktor prosesnya masih jauh dari mencapai hasil yang maksimal. Ini dapat dilihat dari kelima indikator yang ada, salah satunya adalah Indikator dialog tatap muka yaitu kurangnya keterlibatan penuh aktor non-pemerintah dalam dialog langsung yang difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan Taman Wisata Maliogoro. Dalam membangun kepercayaan dapat dikatakan berhasil dengan komunikasi yang baik antara para pihak dalam proses kolaborasi. Komitmen terhadap proses kolaborasi belum sepenuhnya berhasil karena belum adanya kerjasama secara tertulis atau resmi. Indikator pemahaman bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membuat forum pertemuan para aktor dalam

memberikan saran dan masukan untuk menyamakan persepsi bersama. Dan hasil antara kolaborasi dengan para aktor dalam kegiatan *Gemerlap Thamrin Bojonegoro* untuk mewujudkan taman maliogoro sebagai ikon wisata Kabupaten Bojonegoro. Dalam proses kolaborasi dengan para pihak yang berkepentingan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebaiknya membuat perjanjian kerjasama secara tertulis agar kedepannya dalam proses kolaborasi para pihak dapat berkomitmen penuh. Meskipun dalam proses kolaborasi masih terdapat kekurangan yang belum berhasil, tetapi para pihak mengupayakan agar dalam proses kolaborasi berjalan sesuai kesepakatan awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell & Gash. (2008). *collaborative governance theory*.
- Creswell, J. (2013). *Langkah-Langkah dalam Melakukan Studi Metode Campuran Ilmiah*.
- Dinas Perhubungan. (2021). *DATA SEBARAN PERLENGKAPAN JALAN KEBUTUHAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA*. Sipanja.
- Dwi Alamsyah, Mustari, N., Hardi, R., & Mone, A. (2019). Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. <https://Journal.Uwgm.Ac.Id/Index.Php/Fisipublik>, 4(2), 1–16.
- Hariyanto, O. I. B., Andriani, R., & Kristiutami, Y. P. (2018). Pengembangan Kampung Tulip Sebagai Wisata Edukasi di Bandung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 15.
- Ikhsan, F. M. (2024). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Objek Wisata Embung Potorono di Kelurahan Potorono Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Ismail Suardi Wekke. (2020). Metode Penelitian Sosial. In *Bandung* (Issue September).
- Maharani, W. D. (2024). *Mengenal Maliogoro, Ikon Wisata di Kabupaten Bojonegoro yang Menjadi Berkah Tersendiri Bagi Para Penyedia Jasa Andong*. Radar Malioboro.
- Mukti, A., Kurniasih, Y., & Winanta, R. A. (2022). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur*. 7(2), 29–35.
- Nanda, D. D., Suprastiyo, A., & Junadi. (2024). Collaborative Governance dalam pengembangan pariwisata waduk bendo didesa bendo,kecamatan kapas,kabupaten bojonegoro. *Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 2624–2637. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i3.6280>
- Nugrahani, F. (2008). *METODE PENELITIAN KUALITATIF dalam penelitian pendidikan bahasa*. <https://www.scribd.com/document/391582406/Buku>
- Orgita, N. I., Taufiq, A., & 'Rupiarsieh. (2024). *Collaborative Governance dalam Mewujudkan Thengul Sebagai City Branding Kabupaten Bojonegoro*. 14, 232–242.
- Parassari, S., Fitania, C. N. S., & Kamil, M. (2022). Collaborative Governance dalam Pengembangan Wisata Edukasi Little Teksas Wonocolo di Kabupaten Bojonegoro. *VILLAGE: Journal Rural Development And Goverment Studies*, 2(1), 35–40.
- Pemkab Bojonegoro. (2023). *Pemkab Bojonegoro Imbau Warga Jaga Fasilitas Publik Kawasan MH Thamrin*. Pemkab Bojonegoro.

Permatasari Arini. (2023). Collaborative Governance Bumd Desa Margaasih Kabupaten Bandung. *Reformasi*, 13(1), 25–33. <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.4370>

Qulub, S. (2023). *Antusiasme Masyarakat Bojonegoro Pada Malam Hari di Sepanjang Jalan MH. Thamrin*. BlokBojonegoro.Com.

Rahmawati, Pagitha, C., & Hertati, D. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Surabaya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.2444>

Vandayani, S., Widiyarta, Dynda, & Agus. (2022). Collaborative Governance dalam Pengembangan Kampung Majapahit Sebagai Desa Wisata di Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. *Indonesian Governance Journal*, 05(01), 57–69. <https://doi.org/10.24905/igj.v5i1.2003>

Wiraloka, P., & Mukzam, M. D. (2017). Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata(Studi pada Pengembangan Objek Wisata Kayangan Api oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol*, 52(1), 206–213.

PROFIL SINGKAT

M Wafiq Hidayat, Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro,02 agustus 2002. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan di universitas bojonegoro untuk memperoleh gelar S1 pada program studi administrasi publik fakultas ilmu sosial dan politik, selama perkuliahan penulis aktif dalam organisasi mahasiswa yaitu anggota badan esekutif mahasiswa (BEM) FISIP selama 2 periode dari tahun 2023/2024 - 2024/2025.